

# IKATAN KEADABAN

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam menegakkan masyarakat madani atau *civil society*, Nabi Muhammad *saw*, tidak pernah membedakan antara “orang atas,” “orang bawah,” ataupun keluarga sendiri.

Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa dahulu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tapi jika “orang bawah” melakukannya pasti dihukum. Karena itu Nabi Muhammad *saw* menegaskan, seandainya Fatimah pun melakukan kejahatan, maka beliau akan menghukum putri kesayangannya ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berperadaban tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada manusia itu harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah *swt* kepada para rasul, agar mereka “makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan.”

*“Hai para rasul! ‘Nikmatilah’ segala yang baik dan kerjakanlah amal kebaikan, Aku tahu segala apa yang kamu kerjakan,”* (Q 23:51).

Ketulusan ikatan jiwa juga memerlukan sikap yang yakin pada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi dari pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini. Ketulusan ikatan jiwa perlu kepada keyakinan bahwa makna dan hakikat hidup manusia pasti akan menjadi kenyataan dalam kehidupan abadi, kehidupan setelah mati, dalam pengalaman bahagia atau sengsara.

Karena itu, ketulusan ikatan jiwa pada keadilan mengharuskan orang memandang hidup jauh ke depan, tidak menjadi tawanan keadaan di waktu sekarang dan di tempat ini (dunia).

Tetapi tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya perlu kepada komitmen-komitmen pribadi, yang menyatakan diri dalam bentuk “iktikad baik,” yang memang mutlak diperlukan sebagai pijakan moral dan etika dalam masyarakat. Sebab, bukankah masyarakat adalah jumlah keseluruhan pribadi-pribadi para anggotanya? Apalagi tentang para pemimpin masyarakat atau *public figure*, bukankah perlu diketahui, dengan menelusuri masa lalu sang (calon) pemimpin baik dirinya sendiri maupun mungkin keluarganya. Karena itu, di banyak negara seorang calon pemimpin formal harus mempunyai catatan pengalaman hidup yang baik, melalui pengujian, bukan oleh perorangan atau kelembagaan, tapi oleh masyarakat luas, dalam suasana kebebasan yang menjamin kejujuran.

Namun sesungguhnya, seperti halnya dengan keimanan yang bersifat amat pribadi, iktikad baik bukanlah suatu perkara yang dapat diawasi dari luar diri orang bersangkutan. Ia dapat bersifat sangat subyektif, dibuktikan oleh hampir mustahilnya ada orang yang tidak mengaku beriktikad baik. Kecuali dapat diterka melalui gejala lahir belaka, suatu iktikad baik tidak dapat dibuktikan, karena menjadi bagian dari bunyi hati sanubari orang bersangkutan yang paling rahasia dan mendalam.

Oleh sebab itu iktikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat berperadaban. Iktikad baik yang merupakan buah keimanan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa amal saleh, yang

secara takrif adalah tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tindakan kebaikan bukanlah untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Mahakaya, tidak perlu apa pun dari manusia. Siapa pun yang melakukan tindakan kebaikan, maka dia sendirilah melalui hidup kemasyarakatannya, yang akan memetik dan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, siapa pun yang melakukan kejahatan, maka ia sendiri yang akan menanggung akibat kejahatan dan kerugiannya.

Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar dapat terwujud hanya dalam tuntunan hidup kolektif yang memberi peluang pada adanya pengawasan sosial. Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari iktikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Dan pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup.

Amal saleh atau kegiatan “demi kebaikan” dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial, dan menyangkut orang banyak. Suatu klaim berbuat baik untuk masyarakat, apalagi jika perbuatan atau tindakan itu dilakukan melalui penggunaan kekerasan, tidak dapat dibiarkan berlangsung karena mengabaikan masyarakat itu sendiri yang mempunyai pandangan, penilaian dan pendapat.

Dengan demikian masyarakat yang berperadaban bakal terwujud hanya jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, sebelum terbukti sebaliknya. Kejahatan pribadi manusia bukanlah sesuatu yang secara alami berasal dari dalam kedirian. Kejahatan terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar, dari pola budaya yang salah, yang diteruskan terutama oleh orangtua kepada anaknya. Setiap anak pada dasarnya dilahirkan dalam kesucian

asal, namun orangtuanyalah yang membuatnya menyimpang dari kesucian asal itu.

Ajaran kemanusiaan yang suci itu membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimal dan positif, dengan menerapkan prasangka baik (*ḥusn al-zhann*), bukan prasangka buruk (*sū' al-zhann*) kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu. Tali persaudaraan manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk akibat pandangan yang pesimis dan negatif pada manusia.

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimal positif itu kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Karena itu setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar.

Dari pihak yang mendengar, kesediaan untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang amat penting yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri yang juga berpotensi untuk membuat kekeliruan. Kekeliruan atau kekhilafan terjadi karena manusia adalah makhluk yang lemah.

Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan serupa itu dalam Kitab Suci disebut sebagai tanda adanya hidayah dari Allah *swt*, dan membuat yang bersangkutan tergolong orang-orang yang berpikiran yang mendalam (*ulū al-albāb*), yang sangat beruntung.

Musyawaharah pada hakikatnya tidak lain ialah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam bahasa lain, musyawarah adalah hubungan interaktif untuk saling mengikatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah

bersama, dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antarwarga masyarakat.

Itulah masyarakat demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan Ketuhanan Yang Mahaesa. Masyarakat demokratis tidak mungkin tanpa masyarakat berperadaban, masyarakat madani, civil society.

Berada di lubuk paling dalam dari masyarakat madani ialah jiwa *madaniyah*, *civility*, yaitu keadaban itu sendiri: Sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar, dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas suatu masalah.

Dari keadaban inilah lahir sikap yang tulus untuk menghargai sesama manusia, betapa pun seorang individu atau suatu kelompok berbeda dengan diri sendiri dan kelompok sendiri. Karena itu, keadaban atau *civility* menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menghindar dari kebiasaan merendahkan orang atau kelompok lain sebab, “*Kalau-kalau mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan,*” (Q 49:11).<sup>[❖]</sup>